

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Barokah Sitta Dewi
Paulus Theodorus Basuki Hadiprajitno¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain the partial and concurrent effects of Accountability, Transparency, and Supervision on Value for Money Conceptualized Budget Performance in Surakarta City Government Agencies.

The administration of structural work units in the Regional Apparatus (PD) of Surakarta City, which amounted to 27 PDs and included 20 Departments and 7 Regional Agencies, became the population of this study. Three financial administration employees from PDs of Surakarta City Government totaling 81 people became the sample and respondents in this study. These individuals held positions such as Head of PPK (Financial Administration Officer), Head of the Finance or Administration and General Subdivision, Treasurer, Planner or Budgeting, Financial Administrator, and/or Financial Staff. In order to gather primary data for this study, surveys were used to distribute questionnaires. Before gathering study information, the questionnaire underwent validity and reliability tests. Traditional assumption tests, such as normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests, were the testing methods employed in this work. Both statistical and descriptive analytic techniques were used in this study. The research was carried out using the IBM SPSS Statistics 26 application.

According to the findings, the factors of responsibility, openness, and supervision had an impact on budget performance and the idea of value for money at the same time. The performance of the value for money concept budget is somewhat effected by the transparency variable. While the concepts of value for money and responsibility and oversight have a substantial impact on budget performance.

Keywords: Accountability, Transparency, Supervision, Budget Performance with Value for Money Concept

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi, sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang membuat masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan membuatnya menjadi lebih dapat menyampaikan aspirasi terutama untuk perbaikan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Masyarakat semakin menuntut pengelolaan keuangan yang terbuka dan transparan karena banyaknya kasus kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya demi keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* (2016) Pemerintah harus bekerja keras untuk membuat kemajuan penting dalam mendapatkan kembali kepercayaan rakyat dan mendukung pertumbuhan sosio-ekonomi yang inklusif sebagai katalisator kebijakan. Solusi yang ditawarkan adalah dengan mengimplementasikan inisiatif Pemerintah Terbuka (*Open Government*).

Upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan strategi *Open Government* adalah dengan menyediakan kerangka hukum seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak warga negara untuk mendapatkan

¹ Corresponding author

informasi serta mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan agar berbagai mekanisme pelaporan dan pengaturan kelembagaan dapat dibuat lebih efektif dan efisien, dalam menghasilkan perubahan struktural untuk tata pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, serta sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Mardiasmo (dalam Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2006) *UNDP (United Nation Development Program)* memberikan 7 karakteristik pelaksanaan *good governance*, antara lain *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency, effectiveness, and accountability*, dimana dari karakteristik tersebut ia menyimpulkan bahwa paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. “Pemerintah daerah dapat berkinerja lebih baik berkat adanya akuntabilitas publik yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang” (Budiarto dan Puspitasari, 2020). Sedangkan *value for money* diterapkan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya pada organisasi secara efektif serta membuat organisasi sektor publik bertanggung jawab atas sumber daya yang telah dipercayakan publik kepada mereka.

Setiap Perangkat Daerah (PD) termasuk bagian dari sektor publik yang sering menjadi pemberitaan dengan adanya dugaan pengelolaan dan pengawasan anggaran yang tidak efektif. Oleh karena itu, pengawasan terhadap PD oleh masyarakat umum sangat diperlukan untuk mengurangi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Namun, pengelolaan anggaran yang baik tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengawasan langsung terutama dari atasan sebagai pengguna anggaran. Selain dengan pengawasan langsung, badan legislatif dan badan pengawas tertentu juga melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat pembangunan daerah yang signifikan. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Surakarta tahun 2005 – 2025, yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010, yang difokuskan kembali dalam Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026, yaitu salah satu visi Pemerintah Surakarta adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Melalui Perda tersebut, banyak persiapan yang telah dilakukan dan ditetapkan salah satunya adalah bagian anggaran. Namun, dalam keberjalanan pembangunan ini, sudah 2 kali terjadi pergantian kepemimpinan, yang dalam hal ini adalah Walikota Surakarta. Dimana dengan adanya pergantian kepemimpinan ini dapat mempengaruhi keberjalanan proses pembangunan daerah dikarenakan adanya perbedaan kebijakan dari tiap pemimpin dalam menjalankan Perda yang berlaku. Kebijakan-kebijakan tersebut juga mempengaruhi bagaimana pengalokasian dan pengelolaan anggaran yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. Selain itu, melihat data yang tersedia pada *website* BPKAD Kota Surakarta belum tersaji secara lengkap dilaporkan setiap tahunnya. Data yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum hanya ada untuk tahun 2017, 2019 dan terakhir 2020, sehingga masyarakat masih merasa pemerintah kurang transparan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengimplementasian *good governance* tidak dapat lepas dari teori *good corporate governance* yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan pemerintahan dengan tujuan masyarakat. Agar tujuan ini dapat tercapai, perlu adanya prinsip-prinsip yang diantaranya membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan dengan pengelolaan anggaran. Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah dengan memberlakukan sistem penganggaran berbasis kinerja. *Value for money* dapat menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga penting untuk diimplementasikan. Menurut Bastian (2006), sistem kinerja anggaran berkonsep *value for money* atau anggaran berbasis kinerja

merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *ouput* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Adanya akuntabilitas berarti memberikan ruang bagi publik untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Akuntabilitas sendiri dapat menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai alat ukur kinerja dalam sebuah organisasi termasuk organisasi sektor publik untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Ciri lain dari akuntabilitas ini selalu berkaitan dengan pengelolaan anggaran, di mana dalam pendekatannya menjelaskan “semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik di pusat maupun daerah, semakin baik pula pengelolaan anggarannya” (Mahmud, F.A, 2013).

Fernandes (2015) menemukan bahwa ketika digabungkan dengan ide *value for money*, akuntabilitas secara signifikan mempengaruhi kinerja anggaran. Hubungan kedua variabel tersebut juga diperkuat oleh Loi (2016) yang menyimpulkan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan:

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Kebijakan penganggaran pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan anggaran, dan fakta bahwa semakin mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan tersebut, semakin baik kinerja anggaran. Adanya transparansi menjadikan masyarakat lebih kritis dalam menanggapi kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Selain itu, transparansi juga berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah.

Anugriani (2014) menyimpulkan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* untuk menghasilkan anggaran yang diharapkan. “Menggunakan gagasan nilai uang, transparansi didalam perencanaan anggaran meningkatkan kinerja anggaran dan membantu mencapai tujuan anggaran” (Fernandes, 2015). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan:

H₂ : Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money

Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Pengawasan sendiri berarti menyaksikan peristiwa yang sedang terjadi dan membandingkannya dengan peristiwa yang seharusnya terjadi. Apabila terdapat indikasi-indikasi penyimpangan dapat segera dideteksi dan dapat segera diperbaiki, sehingga pengawasan merupakan salah satu bentuk kontrol. Adanya pengawasan ini mampu mencegah praktik-praktik menyimpang, sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan yang baik akan meningkatkan kinerja anggaran dengan konsep *value for money*.

Hasil penelitian Anugriani (2014) yang kemudian diperkuat oleh Adliana (2016), menunjukkan bahwa pengawasan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan:

H₃ : Pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah 27 Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Total sampel sebanyak 81 responden yang dipilih melalui metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel yang dipilih secara khusus dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel penelitian ini adalah 3 orang responden dari masing-masing PD yang menjabat pada bagian penatausahaan keuangan, diantaranya kepala PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), kepala sub bagian keuangan atau administrasi dan umum, bendahara, perencana atau penganggaran, pengadministrasi keuangan, dan staff keuangan. Metode pengumpulan data menggunakan

kuesioner, dimana seluruh indikator pada masing-masing variabel diukur menggunakan skala Likert yang dilengkapi dengan lima alternatif jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Hasil pengembalian kuesioner, diseleksi terlebih dahulu dan menghasilkan dari total 81 kuesioner yang disebar, terdapat 3 kuesioner yang tidak kembali dari 1 Perangkat Daerah, sehingga jumlah kuesioner yang kembali adalah 78 kuesioner. Namun, yang dapat digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 75 kuesioner karena terdapat 2 kuesioner yang tidak diisi lengkap dan satu lainnya diisi oleh responden yang tidak sesuai kriteria sampel. Selanjutnya, dilakukan analisis data agar dapat menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah uji kualitas instrumen dan data menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sedangkan untuk uji asumsi klasik melalui uji normalitas, uji multikolinearitas dan heterokedastisitas, serta untuk uji hipotesis memanfaatkan analisis uji F, uji t dan koefisien determinasi (R^2). Seluruh analisis dilakukan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada uji kualitas instrumen dan data melalui uji validitas dan reliabilitas, diperoleh hasil bahwa seluruh komponen variabel X dan Y dinyatakan valid dan reliabel. Pada uji validitas, dibuktikan dengan perolehan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ yang bernilai 0,227. Sedangkan pada uji reliabilitas, diperoleh nilai *cronbach alpha* untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,60. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik melalui uji normalitas, diperoleh nilai P_{value} sebesar $0,058 > 0,05$, maka data sudah terdistribusi normal dan memungkinkan untuk pengujian hipotesis. Pada uji multikolinearitas dan heterokedastisitas diperoleh hasil bahwa pada penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolonieritas dan heteroskedastisitas.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui 3 tahap yaitu melalui uji koefisien determinasi (R^2), Uji F dan uji t. dengan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa efektif variabel X menjelaskan variabel Y. Hasil statistik nilai R^2 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 ^a	.619	.603	2.914

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

b. Dependent Variable: Total_Y

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,619 yang berarti bahwa 61,9 % variabel dependen (Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money*) dipengaruhi oleh variabel independen (Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan), sedangkan sisanya sebesar 38,1 % dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tahap kedua, uji secara simultan dengan uji F. Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara serempak mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 2
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	979.394	3	326.465	38.442	.000 ^b
	Residual	602.953	71	8.492		
	Total	1582.347	74			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa besaran nilai $F_{hitung} 38,442 > F_{tabel} 2,73$ dan besaran signifikansinya $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan uji hipotesis menerima H_a dan menolak H_0 , sehingga dapat diketahui bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta.

Tahap terakhir adalah melakukan uji t. Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.051	4.016		1.009	.317
Total_X1	.544	.184	.403	2.964	.004
Total_X2	.041	.156	.033	.260	.795
Total_X3	.557	.138	.422	4.038	.000

a. Dependent Variable: Total_Y

- Berdasarkan Tabel 4.12 hasil uji t variabel akuntabilitas menunjukkan nilai $2,964 > 1,993$ dengan signifikansi $0,004 < 0,05$; hal ini berarti bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* dimana penelitian ini diambil pada PD Kota Surakarta. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini diterima.
- Merujuk pada Tabel 4.12 hasil uji t untuk variabel transparansi menunjukkan menunjukkan nilai $0,260 < 1,993$ dengan signifikansi $0,795 > 0,05$; hal ini berarti bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Kota Surakarta. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini ditolak.
- Melihat Tabel 4.12 hasil uji t variabel pengawasan menunjukkan nilai $4,038 > 1,993$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$; hal ini berarti bahwa variabel pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) pada penelitian ini diterima

Pembahasan

Efisiensi anggaran dan gagasan *value for money* (Y) sama-sama dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan pengawasan (X_3), sebagaimana ditunjukkan oleh uji statistik F. Pengujian parsial menggunakan statistik uji-t memperlihatkan meskipun akuntabilitas dan pengawasan memiliki dampak cukup besar terhadap kinerja anggaran ketika mempertimbangkan nilai uang, transparansi tidak memiliki pengaruh tersebut. Berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana variabel independen masing-masing memengaruhi variabel dependen secara parsial:

- Hasil uji t untuk variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa H_1 diterima. Dimana akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran yang berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban pada suatu entitas dalam menyajikan informasi mengenai keputusan atau program yang telah diambil, memberikan pengaruh pada kinerja anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis. Hasil tersebut sesuai dan dibuktikan dengan tersedianya laporan akuntabilitas kinerja pada *website* PPID Kota Surakarta yang memuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Lainnya, dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anugriani (2014) dan Loi (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran yang berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Kota

Surakarta. Namun, penelitian ini bertentangan dengan Muhammad Firdiansyah dan I Putu Sudana (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

- b) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menghasilkan bahwa H_2 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran yang berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. Faktor penyebabnya adalah melihat data yang diperoleh, terutama tanggapan pada kuesioner penelitian transparansi poin 4 yaitu pernyataan “Sulit untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena birokratis” terdapat sebanyak 40% responden memberikan jawaban netral. Sedangkan menurut Nowlis (2008), banyaknya pemilihan opsi netral ini dapat disebabkan karena ambivalensi sehingga responden tidak dapat secara jelas mengambil keputusan. Hal ini juga dapat disebabkan akan ketidaktahuan responden untuk alur birokrasi dokumen untuk publik. Selain itu, data di lapangan juga menunjukkan tidak semua PD Kota Surakarta melakukan tindakan transparansi anggaran didalam hal pengungkapan secara menyeluruh terkait pengumuman anggaran pada masyarakat. Di buktikan dengan tidak adanya website resmi yang memuat pengungkapan anggaran dari masing-masing PD. Hasil tersebut mendukung penelitian Loi (2016) bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Namun, penelitian ini bertentangan dengan Adliana (2016) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.
- c) Hasil uji t untuk pengawasan menghasilkan bahwa H_3 diterima, berarti pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden sesuai kuesioner pada poin 4 yang menyatakan bahwa “Pengawasan anggaran dilakukan oleh Inspektorat Daerah secara rutin” dan pada poin 8 dengan pernyataan “ Pengawasan anggaran dilakukan secara aktif oleh BPK”. Kedua pernyataan tersebut memperoleh poin tertinggi dimana 97% responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan sudah sangat baik dilakukan pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini mendukung pendapat dari Anugriani (2014), Loi (2016) dan Adliana (2016) dimana pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji analisis data serta pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok yang terdapat pada perwujudan *Good Corporate Governance* dan sudah diterapkan dengan sangat baik oleh Pemerintah Kota Surakarta.
2. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Dimana anggaran harus disajikan secara terbuka dan jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat, namun dalam praktiknya Kota Surakarta belum menyajikan transparansi secara menyeluruh dan merata.
3. Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Pengawasan itu sendiri merupakan sistem yang sangat penting yang diterapkan untuk mengawasi kegiatan dan proses yang dilakukan serta membandingkan pelaksanaannya apakah sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta sudah sangat baik, hal ini terbukti dengan adanya pengawasan yang dilakukan bukan hanya dari internal tetapi juga eksternal.

Peneliti memahami bahwa studi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Hanya terdapat tiga variabel bebas yang disertakan dalam penelitian ini sehingga membatasi kemampuan penelitian untuk menarik kesimpulan lebih luas tentang kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan *value for money* untuk memperoleh cakupan

penelitian yang lebih luas. Terdapat saran dari salah satu responden yang berharap bahwa untuk penelitian selanjutnya sebaiknya jangan hanya berhenti pada *value for money* tapi diupayakan lebih luas ke *Best Value* (BV) karena saat ini yang sangat diperlukan adalah tingkat kekritisan kepada pemerintah untuk kebersamaian kesejahteraan masyarakat, warga, dan negara.

REFERENSI

Adiwirya, Firdiansyah, Muhammad., & Sudana, I Putu. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2).

Adliana. 2016. Pengaruh Akuntabilitas, transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berbasis Value for money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

Anugriani, Rezky Mulya. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bone. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin*

Fernandes, W., Kennedy, K., & Hanif, R. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33992.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Surakarta. *Website PPID Kota Surakarta*.

Loi, Suryaningsih. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nommensen.

Maksum, A. (2005), *Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia*. Harian Waspada.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), Mei 2006.

OECD. (2016). Kajian Open Government Indonesia. *OECD*.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 - 2025, (2010).

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.